

PADJAJARAN LAW REVIEW

VOL. II/2014



Kewenangan KPK untuk melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti yang diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Bukan Hasil Korup

Nella Sumika Putri & I Tajuddin

Penyelesaian Sengketa Perkebunan melalui Pendekatan Hukum dan Sosial

Yusuf Saeful Jamil

Doktrin Legal Standing dalam Judicial Review

Wicaksana Dramanda

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Aslinya Bukan Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Nella Sumika Putri, I Tajudin 1 

Penyelesaian Sengketa Perkebunan melalui Pendekatan Hukum dan Sosial: Studi Kasus PT. PN VIII Melawan Petani Teh di Pangalengan, Jawa Barat

Yusuf Saepul Zamil.....24

Konsep *taxpayer* dalam Doktrin *Legal Standing*: Studi pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara *Judicial Review*

Wicaksana Driamanda.....42

Hak atas Kesehatan Deteni: Antara Asa dan Realita

Neneng Widyasari.....52

Privatisasi dalam Pespektif Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

Adityo Bagus Rihandono.....60

Pengadopsian Mekanisme *Constitutional Question* dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Sarana Pengoptimalisasian fungsi Mahkamah Konstitusi Menjaga Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

Abdurahman Sattio.....76

Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Ana'asya Lunawati Putri S, Reyhan Gustira A..... 92

**Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap
Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana
Korupsi.**

Nella Sumika Putri dan I Tajudin¹

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, terdapat perluasan kewenangan KPK yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi semata namun memasuki ranah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai perubahan dalam hukum acara pidana khususnya pada tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Proses pembuktian dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi banyak menimbulkan polemik khususnya mengenai penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai keabsahan kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti terdakwa yang diduga bukan dari tindak pidana korupsi akan tetapi termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana akibat hukumnya jika melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik.

Kata Kunci : Barang Bukti, KPK, Korupsi, Penyitaan, TPPU

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kuantitas maupun kualitas dari tindak pidana korupsi juga semakin meningkat baik dari jumlah pelaku yang tertangkap maupun jumlah dana yang dikorupsi. Pada tahun 2013 terdapat beberapa kasus yang menarik perhatian masyarakat karena jumlah dana yang dikorupsi serta kapasitas pelaku tindak

¹ Penulis adalah dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran